

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan pihak lain atau *agent* (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agen adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya.

Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang diterjemahkan sebagai memaksimalkan harga saham (Sartono, 2010). Dalam kenyataan tidak jarang manajer memiliki tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut karena manajer diangkat oleh pemegang saham maka idealnya mereka akan bertindak *on the best of interest of stockholders*, tetapi dalam praktek sering terjadi konflik. Konflik kepentingan antar agen sering disebut *agency problem* (Sartono, 2010).

Pada perusahaan besar *agency problem* sangat potensial terjadi karena proporsi kepemilikan perusahaan oleh manajer relatif kecil. Dalam

kenyataannya tidak jarang tindakan manajer bukannya memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melainkan memperbesar skala perusahaan dengan cara ekspansi atau membeli perusahaan lain.

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. Agen termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen karena ketidakmampuan *principal* memonitor aktivitas agen dalam perusahaan. Sedangkan agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan agen dan dikenal dengan istilah asimetri informasi (Mahpudin, 2017).

Asimetri informasi antara *agent* dan *principal* dapat memicu manajer untuk melakukan *disfuctional behavior*. Adanya kesenjangan informasi antara manajer dan pemilik perusahaan maka manajemen mempunyai kesempatan untuk memaksimalkan kepentingan mereka yang salah satunya dengan melakukan manajemen laba.

2. Manajemen Laba

Manajemen Laba (*earnings management*) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*) (Fahmi, 2014). Tindakan *earning management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya, artinya tindakan *earning management* dilakukan mengandung motivasi-motivasi tertentu. Hal ini tidaklah aneh karena tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan prestasi manajemen. Selain itu juga suatu yang lazim bahwa besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh (Fahmi, 2014).

Tindakan *earning management* tidak terlepas berhubungan dengan tindakan manajer dan para pembuat laporan keuangan perusahaan dengan cara mengotak-atik data-data serta metode akuntansi yang dipergunakan. Namun jika metode akuntansi dilakukan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu serta dilandasi oleh suatu motivasi tertentu maka ini menjadi suatu yang patut untuk dicurigakan. Apalagi jika tindakan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pasar, seperti ingin menaikkan harga saham di pasar modal. Investor sangat tertarik pada informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan, karena informasi tersebut berdampak harga saham di pasar. Salah satu informasi yang dilihat dan dijadikan analisis oleh investor ada pada posisi laba dan nilai buku.

Tindakan melakukan *earning management* bersifat mengambil keuntungan jangka pendek, tanpa menunggu proses yang sewajarnya. Dorongan tindakan pihak manajemen melakukannya adalah ingin memperlihatkan kepada pihak pemegang saham terhadap prestasi kinerja perusahaan yang semakin lama semakin baik, dan lebih jauh lagi pihak manajemen perusahaan memungkinkan untuk dipertahankan karena prestasinya yang menonjol tersebut. Namun sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan adalah suatu penipuan yang bersifat sangat tidak etis (Fahmi, 2014).

Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management* (Fahmi, 2014):

- a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti menggunakan metode FIFO dan LIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
- b. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgment dalam menyusun estimasi.
- c. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan.

3. Rencana Bonus

Rencana bonus berbasis laba merupakan skema yang populer digunakan dalam memberikan kompensasi kepada eksekutif perusahaan. Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan dapat memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya. Manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu *bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *cap* (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada di bawah *bogey*, tidak ada bonus yang diperoleh manajer sedangkan jika laba berada di atas *cap*, manajer tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah *bogey*, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, demikian pula jika laba berada di atas *cap*. Jadi hanya jika laba bersih berada di antara *bogey* dan *cap*, manajer akan berusaha menaikkan laba bersih perusahaan (Ramadhan, 2017).

Manajer perusahaan dengan rencana bonus kemungkinan besar menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laporan laba periode di periode berjalan. Dasar pemikirannya adalah bahwa tindakan seperti itu mungkin akan meningkatkan persentase nilai bonus jika tidak terdapat penyesuaian terhadap metode terpilih (Belkaoui, 2007).

4. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak ini dilegalkan oleh pemerintah.

Pada tahap awal perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan. Manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang akan diharapkan oleh pihak manajemen (Mahpudin, 2017).

Perencanaan pajak merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan perdebatan antara wajib pajak dan otoritas pajak (Syanthi, dkk, 2012). Hal ini bisa terbilang bahwa perencanaan pajak memungkinkan seorang manajer untuk bebas mengubah angka-angka pada suatu titik atas dasar peraturan yang ada untuk menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan atau bisa disebut dengan penghematan pajak dan untuk mendapatkan

keuntungan seperti memperoleh modal dari para investor dengan menjual saham-saham perusahaan.

Lumbantoruan (1996) dalam Aditama dan Purwaningsih (2014) menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, di antaranya yaitu:

- a. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
- b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
- c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara illegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
- e. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008)

menyebutkan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

5. Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang (Musthafa, 2017). Besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham ditentukan dengan persentase yang disebut *Dividen Payout Ratio*.

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2015) *dividend payout ratio* (DPR) merupakan rasio antara *dividend per share* (DPS) dengan *earning per share* (EPS). Menurut Musthafa (2017) *Dividen Payout Ratio* merupakan perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih. Semakin tinggi akan menguntungkan bagi investor selaku pemegang saham, sebaliknya akan memperl lemah internal finansial perusahaan.

Dividend payout ratio yang ditentukan perusahaan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham setiap tahun yang dilakukan berdasarkan besar kecilnya laba bersih setelah pajak. Perusahaan hanya bisa membagikan dividen besar jika perusahaan mampu menghasilkan laba yang semakin besar. Jika laba yang diperoleh besarnya tetap, perusahaan tidak bisa membagikan dividen yang makin besar karena hal ini berarti perusahaan akan membagikan modal sendiri (Husnan, 2001).

Besar kecilnya *Dividend Payout Ratio* dipengaruhi oleh Musthafa (2017):

- a. Likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan, karena kalau likuiditas perusahaan baik maka dividen yang dapat dibagikan lebih besar, begitu pula sebaliknya apabila likuiditas perusahaan tidak baik maka dividen bisa kecil atau bisa tidak dibagikan sebagai dividen tetap ditahan oleh perusahaan.
- b. Keperluan dana melunasi hutang, apabila perusahaan akan melunasi hutangnya dengan segera maka dividen bisa kecil atau laba ditahan dan sebaliknya apabila perusahaan tidak segera melunasi hutangnya atau tidak ada hutang yang dibayar maka dividen bisa dibayar cukup besar oleh perusahaan dari keuntungan yang diperoleh.
- c. Tingkat investasi yang direncanakan. Apabila perusahaan tahun berikutnya merencanakan investasi yang cukup besar maka dividen tidak akan dibagikan kepada pemegang saham atau dividen kecil, sebaliknya apabila perusahaan tidak ada rencana untuk investasi pada tahun mendatang maka dividen akan dibagikan lebih besar.
- d. Pengawasan, apabila dilakukan pengawasan terhadap perusahaan sehubungan dengan ekspansi perusahaan, maka biasanya perusahaan itu akan menggunakan dananya dari laba perusahaan untuk ekspansi, sehingga kalau ini yang dilakukan maka ekspansi dan perusahaan memperoleh keuntungan, maka dana keuntungan itulah yang digunakan, sehingga dividen kecil atau dividen tidak dibayar.

- e. Ketentuan dari pemerintah, biasanya ini dilakukan terhadap perusahaan milik pemerintah atau Negara BUMN. Apabila ditentukan lama harus ditahan, maka dividen tidak dibagikan atau dividen kecil, begitu pula sebaliknya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan rencana bonus, perencanaan pajak, kebijakan dividend dan manajemen laba dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun Penelitian)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putri (2012)	Variabel <i>independent</i> : kebijakan dividen, <i>good corporate governance</i> Variabel <i>dependent</i> : Manajemen laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba.
2.	Pujiati dan Arfan (2013)	Variabel <i>independent</i> : Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kompensasi bonus Variabel <i>dependent</i> : Manajemen laba	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di BEI. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di BEI. Kompensasi bonus berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun Penelitian)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			pada perusahaan manufaktur di BEI.
3.	Hasty dan Herawaty (2017)	Variabel <i>independent</i> : kepemilikan manajerial, <i>leverage</i> , profitabilitas dan kebijakan dividen Variabel <i>dependent</i> : Manajemen laba	Kepemilikan manajerial, <i>leverage</i> , profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
4.	Aditama dan Purwaningsih (2014)	Variabel <i>independent</i> : Perencanaan pajak Variabel <i>dependent</i> : Manajemen laba	Perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan non manufaktur yang terdaftar di BEI
5.	Mahpudin (2017)	Variabel <i>independent</i> : Perencanaan pajak Variabel <i>dependent</i> : Manajemen laba	Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktek manajemen laba
6.	Ramadhan (2017)	Variabel <i>independent</i> : Rencana bonus, kontrak hutang, biaya politik Variabel <i>dependent</i> : Manajemen laba	Rencana bonus berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap manajemen laba. Kontrak hutang memiliki efek positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sementara itu, biaya politik memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap manajemen laba.
7.	Aurangzeb (2012)	Variabel <i>independent</i> : earning management (EM), return on equity (ROE), size of the firm (SOF) dan self finance ratio (SFR) Variabel <i>dependent</i> : dividend payout (DPO)	earning management (EM), return on equity (ROE), dan self finance ratio (SFR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dividend payout (DPO). size of the firm (SOF) tidak berpengaruh terhadap dividend payout (DPO).

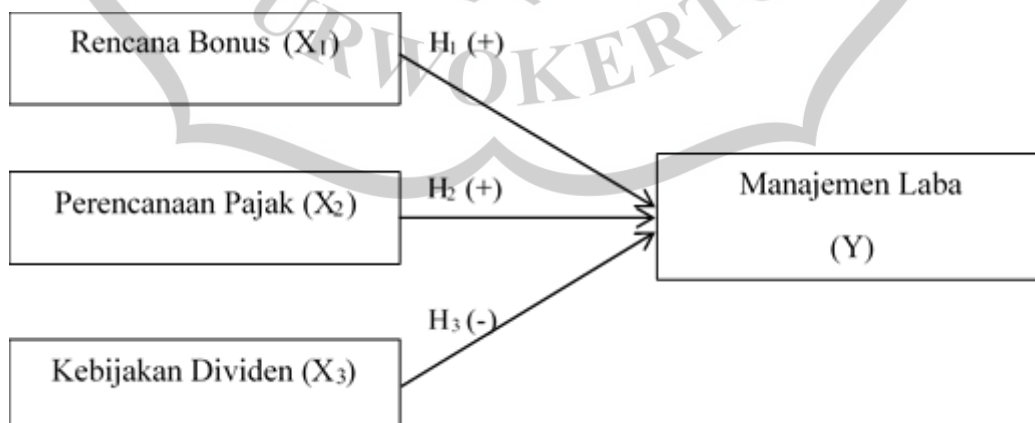
Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun Penelitian)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Hassen (2014)	Variabel <i>independen</i> : Kompensasi eksekutif Variabel <i>dependent</i> : Manajemen laba	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap manajemen laba.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengenai manajemen laba pada perusahaan *food and beverages* tahun 2013-2017. Ada beberapa variabel yang diteliti karena diindikasikan mempengaruhi manajemen laba. Diantaranya rencana bonus, perencanaan pajak dan kebijakan dividen sebagai variabel dependen.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu serta permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini menguji pengaruh rencana bonus, perencanaan pajak dan kebijakan dividen terhadap manajemen laba. Maka model penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian

D. Hipotesis

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat diuraikan hubungan antara variabel rencana bonus, perencanaan pajak dan kebijakan dividen terhadap manajemen laba. Perumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Rencana Bonus terhadap Manajemen Laba

Dalam rencana bonus atau kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Ini berarti bahwa semakin besar bonus yang akan diperoleh manajer, semakin besar motivasi manajer untuk mengelola pendapatan yang akan meningkatkan manajemen labanya. Pada teori agensi manajemen digambarkan sebagai individu yang mementingkan kepentingannya sendiri sehingga jika bonus yang didapatkan didasarkan pada laba maka manajer tersebut akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba dan tidak akan memaksakan diri untuk memilih kebijakan akuntansi yang tidak dapat menaikkan laba jika bonus tidak didasarkan pada *bonus plan* (Ramadhan, 2017).

Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung memilih prosedur akuntansi yang menggeser laba untuk periode mendatang menjadi laba periode sekarang, karena alasan-alasan tertentu, manajer memiliki inisiatif untuk memanipulasi atau mengatur laba yang dilaporkan dengan menggunakan kewenangannya melalui pemilihan metode akuntansi yang dapat mempengaruhi besar kecilnya laba (Deviyanti dan Sudana, 2018). Penelitian ini didukung oleh Pujiati dan Arfan (2013) menunjukkan bahwa

kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H1 : Rencana bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent* masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan (*agent*) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah (*principal*) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi *agent* meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah (Aditama dan Purwaningsih, 2014).

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan berbagai upaya, sepanjang kegiatan tersebut masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Penelitian ini didukung oleh Mahpudin (2017) menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap

manajemen laba. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

3. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Manajemen Laba

Perusahaan umumnya melakukan pembayaran dividen yang stabil dan menolak untuk mengurangi pembayaran dividen. Hanya perusahaan dengan tingkat kemampuan laba yang tinggi dan prospek ke depan yang cerah, yang mampu untuk membagikan dividen. Banyak perusahaan yang selalu mengkomunikasikan bahwa perusahaannya memiliki *prospektif* dalam menghadapi masalah keuangan serta kesulitan untuk membayar dividen. Hal ini berdampak pada perusahaan yang membagikan dividen, yang artinya memberikan tanda pada pasar bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek kedepan yang baik dan mampu untuk mempertahankan tingkat kebijakan dividen yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya (Hasty dan Herawaty, 2017).

Tujuan investor dalam kebijakan dividen agar mendapatkan *return* dari investasi dalam bentuk *capital gain* atau dividen. Dengan cara ini diharapkan untuk meningkatkan keuntungan agar kemajuan perusahaan bisa lebih tinggi atau meningkat dari sebelumnya. Pada sisi lain, manajer terkadang mempunyai kepentingan pribadi yang berbeda dengan kepentingan investor atau pemegang saham, karena manajer melakukan manajemen laba untuk kepentingan sendiri. Menurut Brigham dan Houston

(2011) bahwa kebijakan dividen mempengaruhi jumlah laba ditahan yang tersedia bagi perusahaan, semakin tinggi rasio pembayaran dividen maka semakin kecil tambahan atas laba ditahan dan biaya ekuitas yang tinggi. Maka hasil yang diberikan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian ini didukung oleh Putri (2012) menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

